



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1470, 2017

LAN. *Road Map*. Tahun 2015-2019. Perubahan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan dan optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu mengubah Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Lembaga Administrasi Negara Tahun 2015-2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Lembaga Administrasi Negara Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
 11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Lembaga Administrasi Negara Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2015 - 2019.

Pasal I

Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Lembaga Administrasi Negara Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1108) diubah, sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 19 Juni 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
 NOMOR 20 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA
 ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 13 TAHUN 2015
 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
 REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA ADMINISTRASI
 NEGARA TAHUN 2015-2019

AREA : MENTAL APARATUR

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
		2017	2018	2019		
1	Pemantauan dan Evaluasi RB				Keselarasan pelaksanaan road map RB dan implementasinya	Inspektorat
2	Internalisasi nilai-nilai LAN**				Tingkat pemahaman pegawai atas nilai-nilai LAN	Inspektorat
3	Pengembangan komunikasi dan sosialisasi RB				Tingkat pengetahuan pegawai atas pelaksanaan RB di LAN	Inspektorat
4	Penguatan nilai kebangsaan dan spiritualitas pegawai LAN				Kemanfaatan aktivitas penguatan nilai kebangsaan	Bagian SDM

					dan spiritualitas pegawai	
--	--	--	--	--	---------------------------	--

AREA: PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
		2017	2018	2019		
1	Pengembangan program regulasi LAN (Proreg LAN)**				Efektivitas implementasi Proreg LAN	Bagian Hukum dan Organisasi
2	Review peraturan perundang-undangan di lingkungan LAN				Keselarasan peraturan perundang-undangan di lingkungan LAN dengan produk hukum internal dan eksternal	Bagian Hukum dan Organisasi
3	Pengembangan sistem informasi harmonisasi peraturan perundang-undangan				Ketersediaan sistem informasi untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum dan Organisasi

AREA: PENATAAN KELEMBAGAAN

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
		2017	2018	2019		
1	Review kelembagaan terkait ketepatan fungsi dan ukuran; jenjang organisasi; potensi				Ketersediaan hasil review kelembagaan	Bagian Hukum dan Organisasi

	duplikasi fungsi; keselarasan tujuan; jalur akuntabilitas; keselarasan kinerja; kesesuaian dengan mandat; dan potensi tumpang-tindih fungsi.**					
2	Tindak lanjut review kelembagaan (termasuk restrukturisasi)				Persentase tindak lanjut review kelembagaan	Bagian Hukum dan Organisasi

AREA: PENATAAN TATA LAKSANA

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
		2017	2018	2019		
1	Identifikasi proses bisnis dan SOP				Ketersediaan identifikasi proses bisnis dan SOP	Bagian Hukum dan Organisasi
2	Penyusunan dan implementasi proses bisnis dan SOP ideal				Ketersediaan proses bisnis dan SOP ideal	Bagian Hukum dan Organisasi
3	Review implementasi proses bisnis dan SOP ideal				Kesesuaian proses bisnis dan SOP dengan pelaksanaan	Bagian Hukum dan Organisasi
4	Penataan hak akses informasi di lingkungan LAN				Ketersediaan Perka LAN terkait hak akses atas informasi di lingkungan LAN	Bagian Protokol dan Arsip
5	Penyusunan <i>Grand Design</i> Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi LAN**				Ketersediaan <i>Grand Design</i> Pengembangan Teknologi	Bagian Humas dan Informasi

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
		2017	2018	2019		
					Informasi dan Komunikasi LAN	
6	Penataan arsitektur sistem informasi LAN <ul style="list-style-type: none"> • Integrasi server LAN • Pengembangan VPN LAN • Integrasi domain lan.go.id • Penataan sistem informasi di lingkungan LAN 				<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi server LAN • VPN LAN • Integrasi domain lan.go.id • Kesesuaian sistem informasi di lingkungan LAN dengan <i>Grand Design</i> 	Bagian Humas dan Informasi
7	Pengembangan sistem informasi untuk mendukung tata kelola internal <ul style="list-style-type: none"> • Bidang keuangan • Bidang SDM • Bidang perencanaan dan evaluasi kinerja, program, dan anggaran • Bidang hukum • Bidang kearsipan • Bidang kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik negara • Bidang pengawasan internal 				Ketersediaan dan kemanfaatan sistem informasi untuk mendukung tata kelola internal	Sekretariat Utama Inspektorat Deputi Bidang Kajian Kebijakan

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
		2017	2018	2019		
	• Bidang koordinasi perencanaan kajian kebijakan					
8	Pengelolaan informasi publik				Ketersediaan laporan layanan informasi publik	Bagian Humas dan Informasi
9	Pengembangan inovasi di tingkat unit kerja				Institusionalisasi inovasi dalam proses bisnis dan SOP unit kerja	Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas
10	Sertifikasi ISO kediklatan LAN Jakarta dan STIA LAN Jakarta				Ketercapaian sertifikasi ISO	Pusat Diklat Teknis dan Fungsional Pusat Diklat Kepemimpinan Aparatur STIA LAN Jakarta
11	Sertifikasi ISO 9001 kediklatan PKP2A dan STIA LAN Bandung dan Makassar				Ketercapaian sertifikasi ISO 9001	PKP2A I Jatinangor PKP2A II Makassar

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
		2017	2018	2019		
						PKP2A III Samarinda PKP2A IV Banda Aceh STIA LAN Bandung STIA LAN Makassar

AREA: PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
		2017	2018	2019		
1	Penyusunan rencana kebutuhan pegawai 5 tahun dan tahunan				Ketersediaan dokumen rencana kebutuhan pegawai 5 tahun dan tahunan	Bagian SDM
2	Analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan				Ketersediaan dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja,	Bagian SDM

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
		2017	2018	2019		
					dan evaluasi jabatan	
3	Rekrutmen dan seleksi calon pegawai objektif dan berbasis merit				Keberadaan rekrutmen dan seleksi calon pegawai yang objektif dan berbasis merit	Bagian SDM
4	Penyusunan standard kompetensi jabatan				Ketersediaan dokumen standard kompetensi jabatan	Bagian SDM
5	Asesmen pegawai				Keberadaan laporan asesmen pegawai	Bagian SDM
6	Penyusunan rencana pengembangan kompetensi				Ketersediaan rencana pengembangan kompetensi	Bagian SDM
7	Pengembangan model <i>knowledge sharing</i> dan penempatan kembali (<i>re-entry</i>) pegawai pascatugas belajar					
8	Pengembangan <i>talent management</i> (termasuk <i>talent pool</i>) di lingkungan LAN				Kualitas implementasi <i>talent management</i>	Bagian SDM
9	Penyusunan pedoman manajemen karier pegawai**				Ketersediaan pedoman manajemen karier pegawai	Bagian SDM
10	Pengembangan sistem informasi manajemen SDM				Ketersediaan sistem informasi manajemen SDM	Bagian SDM

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
		2017	2018	2019		
11	Pengembangan sistem informasi pengelolaan pemangku jabatan fungsional				Ketersediaan sistem informasi pengelolaan pemangku jabatan fungsional	Bagian SDM
12	Pengembangan sistem manajemen kinerja pegawai terintegrasi*				Efektivitas sistem manajemen kinerja terintegrasi	Bagian SDM

AREA: PENGUATAN PENGAWASAN

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
		2017	2018	2019		
1	Implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi				Ketersediaan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi	Inspektorat
2	Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi				Keputusan Kepala LAN tentang UPG	Inspektorat
3	Pembangunan lingkungan pengendalian di seluruh unit organisasi				Efektivitas lingkungan pengendalian	Inspektorat
4	Implementasi dan pemantauan pengendalian berbasis risiko				Tingkat kematangan implementasi SPIP	Inspektorat
5	Implementasi dan pemantauan penanganan				Efektivitas penanganan	Inspektorat

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
		2017	2018	2019		
	pengaduan masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sistem informasi pengaduan masyarakat • Pemantauan penanganan pengaduan masyarakat 				pengaduan masyarakat	
6	Implementasi whistleblowing system <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi whistleblowing system • Pemantauan berkala whistleblowing system • Tindak lanjut hasil pemantauan whistleblowing system 				Efektivitas whistleblowing system	Inspektorat
7	Penyusunan kebijakan penanganan benturan kepentingan				Ketersediaan kebijakan internal di bidang penanganan benturan kepentingan	Inspektorat
8	Internalisasi sistem antikorupsi di LAN (pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, whistleblowing system)				Tingkat pemahaman pegawai atas sistem antikorupsi di LAN	Inspektorat
9	Implementasi penanganan benturan				Efektivitas implementasi	Inspektorat

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
		2017	2018	2019		
	kepentingan <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi penanganan benturan kepentingan • Pemantauan berkala penanganan benturan kepentingan • Tindak lanjut hasil pemantauan penanganan benturan kepentingan 				penanganan benturan kepentingan	
10	Pembangunan zona integritas				Keberadaan unit yang memperoleh predikat WBK/WBBM	Inspektorat
11	Peningkatan kapasitas APIP				Tingkat kapabilitas APIP	Inspektorat

AREA: PENGUATAN AKUNTABILITAS

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
		2017	2018	2019		
1	Penyusunan pedoman perencanaan program dan manajemen kinerja*				Ketersediaan pedoman perencanaan program dan manajemen kinerja	Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program
2	Review Renstra LAN 2015-2019				Ketersediaan hasil review	Bagian

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
		2017	2018	2019		
					Renstra LAN 2015-2019	Perencanaan dan Evaluasi Program
3	Pengembangan sistem pemantauan kinerja*				Ketersediaan sistem pemantauan kinerja	Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program
4	Penyelarasan (<i>cascading</i>) dan penyesuaian (<i>alignment</i>) indikator kinerja antartingkat dan antarunit kerja* ** **				Ketersediaan indikator kinerja seluruh unit kerja	Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program
5	Peningkatan kapasitas pengelola akuntabilitas kinerja				Tingkat pemahaman pengelola akuntabilitas kinerja terhadap manajemen kinerja	Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program

AREA: PELAYANAN PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
		2017	2018	2019		
1	Perubahan standard pelayanan dan maklumat pelayanan seluruh unit pelaksana pelayanan publik				Ketersediaan standard pelayanan dan maklumat pelayanan seluruh unit kerja (penyempurnaan dari standard	Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat;

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
		2017	2018	2019		
					pelayanan yang telah ada)	Pusat Diklat Teknis dan Fungsional; Pusat Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional; Pusat Pembinaan Widyaiswara; Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan; PKP2A I Jatinangor; PKP2A II Makassar; PKP2A III Samarinda; PKP2A IV Banda Aceh; STIA LAN Jakarta; STIA LAN Bandung; STIA LAN

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
		2017	2018	2019		
						Makassar; Bagian Hukum dan Organisasi
2	Pengembangan layanan online STIA LAN				Ketersediaan layanan online STIA LAN (bidang akademis, mutu pendidikan)	STIA LAN Jakarta STIA LAN Bandung STIA LAN Makassar
3	Pengembangan layanan kewidyaiswaraan online (SIWI)				Ketersediaan layanan kewidyaiswaraan online	Pusat Pembinaan Widyaiswara
4	Akreditasi lembaga diklat swasta				Ketersediaan sistem akreditasi lembaga diklat swasta	Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat
5	Penyusunan Grand Design Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur (SIPKA)				Ketersediaan Grand Design SIPKA	Deputi Bidang Diklat Aparatur
6	Pengembangan Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur (SIPKA)				Ketersediaan SIPKA sesuai Grand Design	Deputi Bidang Diklat Aparatur
7	Pengembangan layanan jabatan fungsional				Ketersediaan layanan JFAK	Pusat Pembinaan

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
		2017	2018	2019		
	analisis kebijakan berbasis TIK				berbasis TIK	JFAK
8	Pengembangan direktori inovasi administrasi negara				Ketersediaan direktori inovasi administrasi negara	Pusat Inovasi Pelayanan Publik
9	Pengembangan model akselerasi inovasi: <ul style="list-style-type: none"> • Laboratorium inovasi • Street-level innovation • Road map pengembangan inovasi • Laboratorium inovasi virtual • Model evaluasi inovasi • Indeks persepsi inovasi pelayanan publik 				Ketersediaan model-model akselerasi inovasi administrasi negara	Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara

Keterangan

^{*}: komponen dari *main driver* reformasi birokrasi LAN (manajemen kinerja)

^{**}: *key activities* pada setiap area perubahan

Quick Wins Tahun 2017-2019

2017	2018	2019
1. Survey eksternal persepsi korupsi; 2. Sertifikasi ISO 9001 pada penyelenggara diklat dan STIA; 3. Sistem pendaftaran online Diklatpim; dan 4. Sistem informasi akademik STIA LAN.	1. Innovation <i>Impact Assessment</i> ; 2. Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur; dan 3. Manajemen karier pegawai.	1. <i>Talent management</i> LAN; dan 2. Akreditasi lembaga diklat swasta.

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd

ADI SURYANTO